

Legitimasi dan Kritik Hadis terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Abd. Bashir Fatmal¹, La Ode Ismail Ahmad², Muhammadiyah Amin³, Arifuddin Ahmad⁴, Muhammad Andi Ali Amiruddin⁵, Ma'adul Yaqien Makkarateng⁶

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁶ Ankara Üniversitesi, Türkiye

Correspondence Email: abdbashirfatmal@gmail.com

Abstract: *The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a strategic policy of the Indonesian government designed to improve the nutritional status of the population, particularly schoolchildren and other vulnerable groups. Despite its significant social objectives, its normative legitimacy and ethical implementation from the perspective of hadith have not been comprehensively examined. This study aims to analyze the legitimacy and critical evaluation of the MBG Program through the framework of maqāṣid al-sharī'ah. It employs a qualitative library research method using a normative approach and thematic (mawḍū'i) analysis of hadiths concerning food provision, leadership, trustworthiness, justice, and the prohibition of causing harm. The findings demonstrate that the MBG Program possesses strong normative legitimacy through hadiths emphasizing the virtue of iṭ'ām al-ṭa'ām (feeding others), the responsibility of leaders, and the protection of vulnerable groups. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the program contributes to the realization of ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, and supports ḥifẓ al-māl through accountable public financial management. Nevertheless, hadith also provides critical parameters by emphasizing the obligation to uphold trust (amānah), prevent ghuḥūl (misappropriation of public property), implement the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm and no reciprocating harm), ensure distributive justice, and maintain transparency and accountability in governance. Overall, the MBG Program aligns with prophetic values when implemented transparently, fairly, professionally, sustainably, and consistently, thereby strengthening public welfare, social solidarity, ethical governance, national resilience, and long-term human development while reinforcing accountability, policy effectiveness, inclusive participation, institutional integrity, equitable access, and intergenerational social justice across Indonesia.*

Keywords: *Hadith; Free Nutritious Meals Program; Maqāṣid al-Sharī'ah; Iṭ'ām al-Ṭa'ām; Public Trust (Amānah).*

How to cite	Abd. Bashir Fatmal, La Ode Ismail Ahmad, Muhammadiyah Amin, Arifuddin Ahmad, Muhammad Andi Ali Amiruddin, and Ma'adul Yaqien Makkarateng. 2026. "Legitimasi Dan Kritik Hadis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)". <i>Journal of Qur'an and Hadith</i> 1 (1): 1-19.
Copyright	Copyright (c) 2026 Abd. Bashir Fatmal, La Ode Ismail Ahmad, Muhammadiyah Amin, Arifuddin Ahmad, Muhammad Andi Ali Amiruddin, Ma'adul Yaqien Makkarateng (Author)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Meskipun memiliki tujuan sosial yang kuat, legitimasi normatif dan parameter etik implementasinya dalam perspektif hadis belum banyak dikaji secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi sekaligus kritik hadis terhadap Program MBG melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan analisis tematik (*mawḍū'ī*) terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pemberian makanan, kepemimpinan, amanah, keadilan, dan larangan menimbulkan mudarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG memperoleh legitimasi normatif melalui hadis tentang keutamaan *ith'ām al-ṭa'ām*, tanggung jawab pemimpin, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, program ini berkontribusi terhadap terwujudnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, serta mendukung *ḥifẓ al-māl* melalui tata kelola anggaran yang akuntabel. Namun, hadis juga memberikan parameter kritik berupa kewajiban menjaga amanah, mencegah *ghulūl*, menerapkan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, serta menjamin keadilan distribusi. Penelitian ini menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai profetik sepanjang dilaksanakan secara transparan, adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kata Kunci: Hadis; Program Makan Bergizi Gratis; Maqāṣid al-Syari'ah; Ith'ām al-Ṭa'ām; Amanah Publik

PENDAHULUAN

Isu ketahanan pangan dan pemenuhan gizi merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan global kontemporer. Lembaga internasional maupun pemerintah nasional menempatkan akses terhadap makanan bergizi sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹ Kekurangan gizi pada anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas jangka panjang, serta kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Oleh karena itu, intervensi kebijakan publik di bidang pangan dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang menentukan arah kemajuan suatu negara.²

Dalam konteks negara berkembang, persoalan malnutrisi dan ketimpangan akses pangan masih menjadi tantangan multidimensional. Masalah tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi, distribusi sumber daya, pendidikan, serta lemahnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan.³ Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali menjadi pihak paling terdampak karena keterbatasan akses terhadap makanan yang layak dan bergizi. Kondisi ini menuntut kehadiran negara

¹ Talha Burki, "Food Security and Nutrition in the World," *The Lancet Diabetes & Endocrinology* 10, no. 9 (September 2022): 622, [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00220-0](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00220-0).

² Marianthi Sotiraki et al., "Burden of Childhood Malnutrition: A Roadmap of Global and European Policies Promoting Healthy Nutrition for Infants and Young Children," *Children* 9, no. 8 (August 6, 2022): 1179, <https://doi.org/10.3390/children9081179>.

³ Saiya Li and Yali Zhang, "More Unequal Food Distribution in Low-Income Countries Exacerbates Global Hunger Risk," *Sustainable Production and Consumption* 46 (May 2024): 108–18, <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.02.009>.

untuk merancang kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan generasi masa depan secara berkelanjutan.⁴

Di Indonesia, salah satu kebijakan yang lahir dari kebutuhan tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditujukan bagi peserta didik dan kelompok rentan sebagai upaya preventif dalam menekan angka *stunting*, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkuat kualitas generasi. MBG dirancang sebagai kebijakan sosial berbasis anggaran publik yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sistem distribusi pangan.⁵ Secara administratif, program ini merupakan instrumen intervensi negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Meskipun demikian, kebijakan yang menyentuh kebutuhan primer seperti pangan tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek *teknokratis* dan administratif. Dalam masyarakat Muslim, kebijakan publik juga memiliki dimensi normatif dan etis yang perlu dianalisis melalui perspektif ajaran Islam. Tradisi Islam memandang pemenuhan kebutuhan pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi bagian dari tanggung jawab moral kolektif.⁶ Oleh sebab itu, kajian terhadap MBG dalam perspektif hadis menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini selaras dengan nilai-nilai profetik.

Hadis Nabi Muhammad saw. secara eksplisit menempatkan tindakan memberi makan sebagai salah satu indikator kualitas keberislaman. Konsep *ith'ām al-ṭa'ām*, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kepemimpinan menunjukkan bahwa Islam mengintegrasikan kesalehan individual dengan tanggung jawab sosial.⁷ Sunnah tidak hanya membangun spiritualitas personal, tetapi juga menegaskan kewajiban melindungi kelompok lemah dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.⁸ Dengan demikian, kebijakan negara yang berorientasi pada pemenuhan pangan memiliki relevansi langsung dengan nilai-nilai tersebut.

Selain legitimasi normatif, kebijakan sosial dalam Islam perlu dianalisis melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Teori *maqāṣid* menempatkan perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta sebagai tujuan fundamental syariat. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kebijakan publik berdasarkan dampaknya terhadap

⁴ Aaron Reeves, Rachel Loopstra, and Valerie Tarasuk, "Family Policy and Food Insecurity: An Observational Analysis in 142 Countries," *The Lancet Planetary Health* 5, no. 8 (August 2021): e506–13, [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00151-0](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00151-0).

⁵ Firre An Suprpto et al., "A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program," *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 6, no. 2 (August 24, 2025): 297–312, <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>.

⁶ Muhammad Syahrul, Patta Bundu, and Farida Aryani, "Exploring the Need for a Prophetic-Based Group Counseling Model to Enhance Student Discipline in Madrasah Aliyah," *International Journal of Current Science Research and Review* 08, no. 08 (August 26, 2025), <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i8-40>.

⁷ Irka Mulianty, Hamdanah Hamdanah, and Noor Fahmi, "Dasar Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan," *Journal on Education* 6, no. 4 (June 18, 2024): 20928–35, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6226>.

⁸ Salman Faris, "Sunnah as a Bridge between Theological and Practical Dimensions," *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (August 2, 2024): 120–35, <https://doi.org/10.59373/drs.v2i2.31>.

kemaslahatan manusia secara komprehensif.⁹ Dalam konteks MBG, analisis maqāṣid penting untuk melihat apakah program tersebut benar-benar merealisasikan perlindungan jiwa dan generasi, atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah akibat lemahnya tata kelola.

Kajian terhadap kebijakan pangan dalam perspektif hadis sejauh ini masih relatif terbatas dan cenderung bersifat deskriptif. Banyak penelitian berfokus pada dimensi sosial dan ekonomi bantuan makanan, tetapi belum secara mendalam mengintegrasikan analisis hadis tematik dengan konsep masalah dan amanah publik.¹⁰ Padahal, hadis tidak hanya menyediakan dasar legitimasi, melainkan juga menetapkan standar etika yang ketat terkait pengelolaan amanah, keadilan distribusi, serta larangan menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis legitimasi dan kritik hadis terhadap Program Makan Bergizi Gratis melalui pendekatan studi tematik (*mawḍūʿī*). Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana hadis memberikan dasar normatif terhadap kebijakan pemberian makanan dalam konteks negara modern, dan bagaimana hadis menetapkan parameter kritik terhadap implementasi kebijakan tersebut dalam kerangka masalah dan amanah publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan justifikasi normatif, tetapi juga kerangka evaluatif berbasis sunnah.

Dengan kerangka tersebut, artikel ini berargumen bahwa MBG memiliki legitimasi normatif sebagai bentuk aktualisasi *masalahah ʿāmmah*, namun legitimasi tersebut bersifat kondisional terhadap implementasi yang amanah, adil, dan bebas dari mafsadah. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hadis tematik yang responsif terhadap isu kebijakan publik serta memperkaya diskursus *maqāṣid* dalam konteks pembangunan sosial modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-normatif yang berfokus pada analisis teks hadis dalam konteks kebijakan publik kontemporer. Sumber data primer berupa hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan tema *ithʿām al-ṭaʿām*, kepemimpinan, amanah, keadilan distribusi, dan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Hadis-hadis tersebut ditelusuri melalui kitab-kitab hadis *muʿtabarah* seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abī Dāwud, Sunan al-Tirmizī, dan Sunan Ibn Mājah. Data sekunder diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer tentang maqāṣid al-syarīʿah, *masalahah ʿāmmah*, serta kajian *fiqh siyasah* dan kebijakan publik dalam perspektif Islam. Pendekatan yang digunakan adalah studi tematik (*mawḍūʿī*), yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki keterkaitan makna dengan topik penelitian, kemudian

⁹ Muhammadong Muhammadong, “The Role of Maqāṣid Al-Sharīʿah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 5 (October 31, 2025): 136–46, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i5.1508>.

¹⁰ Chikita Ramadhani et al., “Pemahaman Kualitas Gizi Dan Kehalalan Program Mbg Dalam Perspektif Mahasiswa Gizi : Tinjauan Hadis Nabi Muhammad Saw Terhadap Isu Kontaminasi Dan Pangan Ultra – Proses,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 15, no. 1 (January 15, 2026): 104–17, <https://doi.org/10.52657/jik.v15i1.3408>.

dianalisis secara komprehensif untuk menemukan konstruksi normatif dan etis yang terkandung di dalamnya. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: identifikasi tema, klasifikasi hadis berdasarkan subtema, analisis kandungan makna (*syarh ma'nawī*), serta kontekstualisasi dengan realitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hadis Utama

Penelitian ini bertumpu pada hadis-hadis yang secara eksplisit memuat ajaran tentang pemenuhan kebutuhan pangan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kepemimpinan. Pendekatan studi tematik (*al-dirāsah al-mawḍū'īyyah*) digunakan untuk menghimpun riwayat-riwayat yang relevan, kemudian dianalisis sebagai dasar normatif dalam menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hadis-hadis yang dipilih merepresentasikan tiga konsep utama dalam sunnah, yaitu إطعام الطعام (memberi makan), larangan membiarkan kelaparan sebagai indikator solidaritas sosial, serta الرعاية والمسؤولية (*ri'āyah* dan pertanggungjawaban pemimpin) dalam menjaga kesejahteraan rakyat.

1. Keutamaan Memberi Makan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

Hadis ini menunjukkan bahwa memberi makan bukan sekadar tindakan sosial biasa, melainkan bagian dari manifestasi keislaman yang ideal. Dalam konteks kebijakan publik, MBG dapat dipandang sebagai bentuk institusionalisasi nilai *ith'ām al-ṭa'ām* dalam skala negara.

2. Solidaritas Sosial dan Larangan Membiarkan Kelaparan

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ.

Hadis ini secara normatif menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tanggung jawab sosial kolektif. Jika pada tingkat individu saja ditegaskan larangan membiarkan tetangga kelaparan, maka pada level negara tanggung jawab tersebut menjadi lebih besar dan lebih sistemik.

3. Tanggung Jawab Pemimpin

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

Pemilihan tema hadis tentang memberi makan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan konseptual bahwa ketiga tema tersebut merepresentasikan kerangka normatif utama dalam Sunnah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam teori hadis tematik (*al-dirāsah al-mawḍū'īyyah*), suatu fenomena sosial kontemporer dianalisis dengan menghimpun hadis-hadis yang memiliki kesatuan makna dan orientasi nilai terhadap isu tersebut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

sebagai kebijakan pemenuhan pangan publik secara substantif beririsan dengan konsep *ith'ām al-ṭa'ām* (pemberian makanan), tanggung jawab kolektif terhadap kelompok rentan, serta prinsip *ri'āyah al-ra'iyyah* (pemeliharaan rakyat oleh pemimpin). Oleh karena itu, ketiga tema hadis ini dipilih sebagai landasan teoritik karena secara konseptual membentuk fondasi etis dan normatif dalam menilai legitimasi maupun kritik terhadap kebijakan pangan dalam perspektif Islam.

***Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

1. *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa dan Kesehatan Publik)

Ḥifẓ al-nafs merupakan salah satu tujuan paling fundamental dalam *maqāṣid al-syarī'ah* karena perlindungan terhadap jiwa menjadi prasyarat utama bagi terlaksananya fungsi-fungsi keagamaan dan sosial manusia.¹¹ Dalam konteks kontemporer, menjaga jiwa tidak hanya dimaknai sebagai larangan menghilangkan nyawa, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang menopang keberlangsungan hidup, seperti pangan dan kesehatan.¹² Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang secara langsung berkontribusi pada perlindungan jiwa melalui pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Kekurangan gizi berkorelasi dengan meningkatnya risiko penyakit, lemahnya imunitas, serta gangguan kesehatan jangka panjang yang dapat mengancam kualitas hidup.¹³ Oleh karena itu, MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan langkah preventif dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas kesehatan generasi. Dalam kerangka *maqāṣid*, kebijakan ini memiliki legitimasi kuat sebagai bentuk perlindungan jiwa secara sistemik melalui intervensi negara.

2. *Ḥifẓ al-'Aql* (Penguatan Kapasitas Kognitif dan Pendidikan)

Ḥifẓ al-'aql dalam pengembangan *maqāṣid* modern tidak hanya berkaitan dengan larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, tetapi juga mencakup upaya memperkuat kapasitas intelektual manusia.¹⁴ Pemenuhan gizi memiliki hubungan erat dengan perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak. Anak yang mengalami malnutrisi cenderung mengalami gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, serta keterlambatan perkembangan intelektual.¹⁵ Dalam konteks ini, MBG berfungsi mendukung *ḥifẓ al-'aql* melalui dua dimensi: biologis dan sosial-pendidikan.

¹¹ Arkin Haris et al., "Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, August 13, 2024, 219–36, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.

¹² David Kaimowitz and Douglas Sheil, "Conserving What and for Whom? Why Conservation Should Help Meet Basic Human Needs in the Tropics," *Biotropica* 39, no. 5 (September 15, 2007): 567–74, <https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2007.00332.x>.

¹³ Muhammad Naufal Putra Abadi et al., "Unraveling Future Trends in Free School Lunch and Nutrition: Global Insights for Indonesia from Bibliometric Approach and Critical Review," *Nutrients* 17, no. 17 (August 27, 2025): 2777, <https://doi.org/10.3390/nu17172777>.

¹⁴ Anis Ni'am Imana, "Implementation Of Maqāṣid Al-Syarī'ah As Model Government's Policy At Malang City On Period 2011-2016," *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (December 31, 2018), <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol14.Iss1.104>.

¹⁵ Kathrin Cohen Kadosh et al., "Nutritional Support of Neurodevelopment and Cognitive Function in Infants and Young Children—An Update and Novel Insights," *Nutrients* 13, no. 1 (January 10, 2021): 199, <https://doi.org/10.3390/nu13010199>.

Secara biologis, asupan nutrisi yang memadai membantu perkembangan otak dan stabilitas fungsi kognitif.¹⁶ Secara sosial, pemenuhan gizi meningkatkan kesiapan anak dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal.¹⁷ Dengan demikian, MBG dapat dinilai sebagai kebijakan yang berkontribusi pada penguatan kualitas intelektual generasi dan selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga akal manusia.

3. *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan dan Pembangunan Kualitas Generasi)

Konsep *ḥifẓ al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap legitimasi keturunan, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas generasi secara menyeluruh. Generasi yang sehat, kuat, dan produktif merupakan fondasi keberlanjutan masyarakat.¹⁸ MBG memiliki relevansi langsung dengan perlindungan keturunan karena program ini berorientasi pada perbaikan kualitas gizi anak sebagai calon generasi masa depan. Malnutrisi dan *stunting* berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan daya saing manusia ketika dewasa.¹⁹ Dengan menyediakan makanan bergizi secara sistemik, MBG dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan generasi (*binā' al-jīl*) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang tarbiyah dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, program ini memiliki legitimasi *maqāṣidiyah* sebagai bentuk perlindungan keturunan dalam makna yang lebih luas dan substantif.

4. *Ḥifẓ al-Māl* (Amanah Anggaran dan Tata Kelola Kebijakan)

Walaupun dimensi dominan MBG berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, kebijakan ini juga memiliki keterkaitan dengan *ḥifẓ al-māl*. Dari sisi keluarga, MBG dapat mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan makan anak, sehingga membantu stabilitas keuangan keluarga dan mendukung keberlanjutan pendidikan.²⁰ Dari sisi negara, program ini melibatkan pengelolaan anggaran publik dalam jumlah besar yang menuntut prinsip amanah dan transparansi. Dalam perspektif *maqāṣid*, harta publik merupakan amanah kolektif yang harus dikelola secara efisien dan *akuntabel*. Transparansi anggaran, efisiensi belanja, pencegahan kebocoran, serta pengawasan distribusi menjadi bagian dari

¹⁶ Elizabeth L Prado et al., "Maternal Multiple Micronutrient Supplementation and Other Biomedical and Socioenvironmental Influences on Children's Cognition at Age 9–12 Years in Indonesia: Follow-up of the SUMMIT Randomised Trial," *The Lancet Global Health* 5, no. 2 (February 2017): e217–28, [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(16\)30354-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(16)30354-0).

¹⁷ Marina Roberts et al., "The Effects of Nutritional Interventions on the Cognitive Development of Preschool-Age Children: A Systematic Review," *Nutrients* 14, no. 3 (January 26, 2022): 532, <https://doi.org/10.3390/nu14030532>.

¹⁸ Alwan Subaki and Khafid Abadi Khafid, "Reinterpretasi Ḥifẓ An-Nasl Menurut At-Ṭāhir Bin 'Āsyūr Dan Relevansinya Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (June 29, 2025): 12–24, <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.

¹⁹ Nadia Akseer et al., "Economic Costs of Childhood Stunting to the Private Sector in Low- and Middle-Income Countries," *EclinicalMedicine* 45 (March 2022): 101320, <https://doi.org/10.1016/j.eclim.2022.101320>.

²⁰ Audrey G. Tangkudung, "Prabowo-Gibran's Free Nutritious Food: Impacts on Human Capital and Community Economy," *Journal of Comprehensive Science* 4, no. 5 (June 1, 2025): 1578–87, <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i5.3146>.

implementasi *ḥifẓ al-māl* dalam konteks kebijakan ini.²¹ Jika tata kelola lemah, potensi penyalahgunaan dapat mengubah kemaslahatan menjadi mafsadah, sehingga dimensi perlindungan harta harus menjadi parameter evaluatif dalam pelaksanaan MBG.

5. MBG sebagai Masalah *‘Āmmah*

Perspektif *fiqh siyasah* dan *maqāṣid al-syarī’ah* menempatkan kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat sebagai bagian dari *masalah ‘āmmah* (kemaslahatan umum). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi kriteria tersebut karena menysasar masyarakat luas, menyentuh kebutuhan primer seperti pangan dan kesehatan, serta berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi.²² Dalam kerangka *maqāṣid*, kemaslahatan harus terukur melalui dampak nyata; apabila MBG terbukti memperbaiki gizi, menurunkan *stunting*, dan meningkatkan kualitas belajar, maka program ini dapat dinilai sebagai *masalah* yang selaras dengan tujuan syariat. Masalah tersebut wajib dijaga dari potensi mafsadah, sebab makanan tidak layak, distribusi yang tidak adil, korupsi anggaran, atau penyimpangan tujuan sosial dapat menghilangkan legitimasi *maqāṣidiyahnya*.²³

Legitimasi Normatif dan Kerangka *Siyasah Syar’iyyah*

Kajian terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif hadis bertujuan menegaskan dasar legitimasi tekstualnya dalam sunnah Nabi saw. serta menjelaskan posisi kebijakan tersebut dalam kerangka *fiqh sosial* dan *siyasah syar’iyyah*.²⁴ Analisis ini menjadi penting karena kebijakan publik dalam Islam tidak hanya dinilai dari aspek administratif atau efektivitas teknis semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip normatif syariat yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah.²⁵ Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak berhenti pada aspek legal-formal, melainkan harus berakar pada nilai-nilai etik profetik. Penelitian ini menemukan bahwa MBG memiliki legitimasi normatif yang kuat, selama pelaksanaannya dijalankan sesuai prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, yang merupakan inti ajaran sosial dalam hadis.

Nilai dasar yang paling menonjol dalam hadis terkait MBG adalah konsep *ith’ām al-ṭa’ām* (memberi makan). Hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa “Islam yang paling baik adalah engkau memberi makan dan memberi salam kepada orang

²¹ Raden Abyan Aradea Narayana and Aris Machmud, “Audit Negara Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’Ah,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (July 15, 2025): 607–23, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.372>.

²² Mifti Ibdalia and Muhammad Albahi, “Ekonomi Dan Politik Pendekatan Maqasid Syariah,” *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (March 25, 2025): 355–64, <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.637>.

²³ Nurul Azzahra et al., “Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 4 Tangerang,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (June 21, 2025): 5036–44, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335>.

²⁴ Ahmad Muhyidin and Muhammad Syarofi, “Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia Dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz Al-Nafs,” *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 6, no. 1 (January 25, 2026): 5214–20, <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7506>.

²⁵ Aulia Rahmawati and Bagus Satrio, “Re-Actualization of the Concept of Al-Maslahah Al-Mursalah in Sharia-Based Public Policy Formulation,” *Samarinda International Journal of Islamic Studies*, May 26, 2024, 89–100, <https://doi.org/10.64093/sijis.v1i2.596>.

yang engkau kenal maupun tidak” menunjukkan bahwa memberi makan bukan sekadar amal sosial, tetapi indikator kualitas keberislaman dan ekspresi nyata dari solidaritas iman.²⁶ Dalam konteks ini, pemberian makanan memiliki nilai ibadah yang tinggi karena menyentuh kebutuhan dasar manusia yang bersifat *daruriyah*. MBG dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi nilai tersebut dalam level kebijakan publik. Jika memberi makan pada tingkat individu merupakan kesalahan personal, maka penyediaan makanan bergizi pada tingkat negara merupakan bentuk kesalahan struktural yang merealisasikan nilai-nilai sosial kenabian dalam sistem pemerintahan modern. Negara dalam hal ini bertindak sebagai representasi kolektif umat dalam mengaktualisasikan ajaran sunnah pada ranah kebijakan.²⁷ Oleh karena itu, MBG tidak hanya kebijakan teknokratis, tetapi mengandung dimensi etis-religius yang berakar kuat pada sunnah dan memiliki legitimasi moral yang substansial.

Perspektif hadis juga menegaskan bahwa MBG sejalan dengan prinsip tanggung jawab kepemimpinan (*ri'āyah*). Hadis yang menyatakan “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” menempatkan kepemimpinan sebagai amanah yang menuntut pemeliharaan dan perlindungan terhadap rakyat.²⁸ Konsep ini tidak bersifat simbolik, tetapi mengandung konsekuensi moral dan eskatologis yang serius. Negara sebagai pemimpin kolektif memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk menjamin kesejahteraan dasar masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan primer yang masuk kategori *darūriyyāt*. Pemenuhan pangan dan gizi, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan, dapat dikategorikan sebagai bagian integral dari fungsi *ri'āyah* tersebut.²⁹ Dengan demikian, MBG merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip kepemimpinan dalam hadis, yakni pemimpin tidak boleh membiarkan rakyat berada dalam kondisi kekurangan pangan yang mengancam kesehatan, perkembangan intelektual, dan masa depan generasi.

Dalam perspektif fiqh sosial, kebijakan publik dinilai berdasarkan sejauh mana ia mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*) dan tidak bertentangan dengan *nash* yang sahih.³⁰ MBG memenuhi indikator *maslahah* karena menyentuh kebutuhan primer berupa pangan dan kesehatan, memberikan manfaat luas bagi

²⁶ Rinatul Khumaimah and Zulfatun Anisah, “The Essence of Giving Food as The Spirit of Islam in The Book “*الاعطاع روح الاسلام*” by Syeh Ali Bin Ali Bin Ibrahim U'dhobi,” *Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought* 4 (July 19, 2024): 50–58, <https://doi.org/10.15642/ICMUST.4.2024.1657>.

²⁷ Christian Möller, “Discipline and Feed: Food Banks, Pastoral Power, and the Medicalisation of Poverty in the UK,” *Sociological Research Online* 26, no. 4 (December 5, 2021): 853–70, <https://doi.org/10.1177/1360780420982625>.

²⁸ Muhammad Hamdi, “Implementasi Hadis-Hadis Tentang Tanggung Jawab Kepemimpinan: Studi Ma'anil Hadis,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 9 (September 2, 2025), <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i9.9727>.

²⁹ Ashokkumar Thirunavukkarasu et al., “Evaluation of Dietary Patterns and Their Impact on Eye Health among Saudi Adults—A Multi-Regional Cross-Sectional Analysis in Makkah, Riyadh, and Qassim,” *Frontiers in Nutrition* 11 (June 18, 2024), <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1383725>.

³⁰ Dinda Nurul Meydianti, Marwin, and Hendriyadi, “Fiqh Siyasa as an Analytical Framework for Literacy Policy Implementation: Evidence from West Lampung, Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, January 15, 2026, 124–38, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11249>.

masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.³¹ Hadis-hadis tentang kepedulian terhadap fakir miskin, anak yatim, dan kelompok lemah memperlihatkan orientasi Islam yang kuat pada perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas moral. MBG yang menysasar peserta didik dan masyarakat kurang mampu secara substantif sejalan dengan orientasi tersebut.³² Dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, selama kebijakan tersebut berorientasi pada kemaslahatan publik dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.³³ Dengan pertimbangan ini, MBG dapat dipahami sebagai kebijakan *ijtihādiyyah* yang sah, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan zaman, sehingga secara normatif dapat dinilai tidak hanya boleh (*mubāh*), tetapi mendekati anjuran (*mandūb*) karena kandungan nilai kemanusiaan dan perlindungan sosial yang tinggi.

Hadis Nabi saw. juga menunjukkan bahwa sunnah tidak hanya membangun kesalehan individu, tetapi membangun solidaritas sosial sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Banyak riwayat yang menjadikan kepedulian terhadap kaum lemah sebagai ukuran keimanan, sekaligus menegaskan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.³⁴ Dalam konteks ini, MBG dapat dibaca sebagai aktualisasi nilai profetik dalam tata kelola modern yang mencerminkan kepedulian terhadap kelompok lemah (*ri'āyah al-ḍu'afā'*), semangat solidaritas sosial (*ta'āwun*), serta tanggung jawab kolektif (*al-mas'ūliyyah al-jamā'iyah*). Namun demikian, kesesuaian MBG dengan sunnah tidak cukup diukur dari niat kebijakan atau retorika sosialnya, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya. Legitimasi normatif akan tetap kokoh selama implementasi program dijalankan secara adil, transparan, *akuntabel*, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan nyata penerima manfaat.

Berdasarkan keseluruhan analisis normatif tersebut, dapat ditegaskan bahwa hadis tentang *ith'ām al-ṭa'ām* memberikan legitimasi moral terhadap penyediaan makanan bagi masyarakat, sementara hadis tentang tanggung jawab pemimpin menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari amanah kepemimpinan. Dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, MBG termasuk kebijakan *ijtihādiyyah* yang sah dan berorientasi pada *maslahah 'āmmah* yang menyentuh kebutuhan *daruriyah*. Secara normatif, program ini dapat dinilai sebagai kebijakan yang dianjurkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat dan tetap berada dalam koridor amanah serta keadilan. Perspektif hadis dengan demikian tidak hanya memberi pembenaran tekstual, tetapi juga menyediakan kerangka etik dan parameter normatif bagi implementasi kebijakan publik, sekaligus membuka ruang evaluasi kritis terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.

³¹ Thirunavukkarasu et al., "Evaluation of Dietary Patterns and Their Impact on Eye Health among Saudi Adults—A Multi-Regional Cross-Sectional Analysis in Makkah, Riyadh, and Qassim."

³² Muhyidin and Syarofi, "Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia Dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz Al-Nafs."

³³ Derri Fadilla Fadilla and Muhammad Arya Arya, "The Relevance of Islamic Law in the Formation of Public Policy in the Era of Globalization," *Alhamdulillah : Jurnal Agama Islam* 3, no. 02 (December 30, 2024): 41–45, <https://doi.org/10.54209/alhamdulillah.v3i02.315>.

³⁴ Faris, "Sunnah as a Bridge between Theological and Practical Dimensions."

Kritik Hadis terhadap Implementasi MBG: Parameter Amanah Publik, Keadilan Distribusi, dan Pencegahan Mafsadah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki legitimasi normatif yang kuat melalui hadis-hadis tentang *ith'ām al-ṭa'ām*, tanggung jawab kepemimpinan, dan perlindungan kelompok lemah. Namun, dalam perspektif syariat, kebijakan publik tidak cukup dinilai dari tujuan idealnya, sebab syariat menuntut kesesuaian antara tujuan (*maqṣad*) dan pelaksanaan (*taṭbīq*). Hadis dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen kritik moral dan evaluasi sosial. Program berskala nasional seperti MBG yang menyangkut anggaran publik besar berpotensi menghadirkan kemaslahatan yang luas, tetapi pada saat yang sama menyimpan risiko mafsadah yang serius apabila dikelola tanpa amanah, tanpa transparansi, dan tanpa kontrol kualitas. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang amanah, larangan penipuan, prinsip anti-mudarat, serta keadilan distribusi menjadi fondasi utama untuk menilai batas etis dan potensi penyimpangan program ini.

1. Amanah Publik dan Bahaya *Ghulūl* (Korupsi) dalam Program Sosial

Amanah merupakan prinsip etik yang sangat sentral dalam hadis, terutama ketika berkaitan dengan urusan publik dan pengelolaan hak masyarakat. Anggaran MBG pada hakikatnya merupakan *māl al-'āmmah* (harta publik) yang wajib dijaga secara ketat karena ia menyangkut hak dasar rakyat, bukan sekadar proyek administratif.³⁵ Dalam tradisi hadis dan fiqh, penyalahgunaan harta publik dikenal dengan istilah *ghulūl*, yakni pengkhianatan terhadap amanah kolektif, yang secara moral lebih berat dibanding pelanggaran terhadap harta individu. Dalam konteks MBG, potensi *ghulūl* dapat muncul melalui berbagai bentuk penyimpangan, seperti pengurangan porsi makanan, penurunan kualitas bahan, mark-up harga, manipulasi laporan distribusi, pengadaan yang tidak transparan, hingga penyaluran yang tidak sesuai sasaran.³⁶ Hadis Nabi saw yang menegaskan “Barang siapa menipu kami maka ia bukan bagian dari kami” (HR. Muslim) menjadi prinsip moral yang sangat tegas untuk mengkritik praktik semacam ini. Hadis tersebut menunjukkan bahwa penipuan bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi penyimpangan etis yang menghilangkan karakter keislaman dalam muamalah sosial. Dalam program seperti MBG, penipuan lebih berat karena korbannya adalah kelompok rentan—anak sekolah dan masyarakat lemah—yang tidak memiliki daya tawar untuk menuntut haknya. Dengan demikian, penyimpangan anggaran dan kualitas dalam MBG bukan hanya masalah efektivitas kebijakan, tetapi bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan langsung dengan ruh syariat.

³⁵ Jannatul Firdausiyah and Ainur Rofiq Sofa, “Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Tekn,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (December 12, 2024): 102–31, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872>.

³⁶ Asep Saefudin, Abd. Muid N, and Kerwanto Kerwanto, “Money Politic, Gratifikasi, Dan Hadiah Perspektif Al-Isfahani Dalam Kitab Al-Mufradât Fî Gharîb Al-Qur'ân,” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 11 (August 14, 2025), <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i11.262>.

2. Prinsip *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*: Standar Keamanan Pangan sebagai Tuntutan Syariat

Prinsip hadis "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" menegaskan bahwa kebijakan sosial tidak boleh menghasilkan bahaya, dan kemaslahatan tidak boleh dibangun di atas mudarat. Hadis ini telah menjadi kaidah besar dalam fiqh dan digunakan ulama untuk menilai kebijakan yang berdampak pada kesehatan publik.³⁷ Dalam konteks MBG, kaidah ini menetapkan bahwa penyediaan makanan tidak cukup hanya memenuhi aspek "ketersediaan", tetapi harus memenuhi unsur *halal*, *ṭayyib*, higienis, aman, dan sesuai kebutuhan gizi. Program yang menyajikan makanan basi, terkontaminasi, tidak higienis, atau menu yang tidak sesuai standar gizi pada hakikatnya telah melanggar prinsip dasar syariat. Lebih dari itu, jika MBG sampai menimbulkan kasus keracunan, gangguan kesehatan massal, atau penyebaran penyakit akibat sanitasi yang buruk, maka program tersebut bukan sekadar gagal, tetapi berubah menjadi mafsadah yang bertentangan dengan *maqāṣid* perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*). Dengan demikian, hadis ini memberi parameter tegas bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah distribusi, tetapi dari jaminan keamanan dan kelayakan konsumsi yang benar-benar melindungi kesehatan penerima manfaat.

3. Keadilan Distribusi: MBG Tidak Boleh Menjadi Proyek Elitis atau Diskriminatif

Keadilan (*ʿadl*) merupakan prinsip yang menempati posisi inti dalam syariat dan menjadi ukuran legitimasi kebijakan publik. Dalam konteks MBG, keadilan tidak hanya berarti pemerataan program, tetapi juga keadilan dalam kualitas, sasaran, dan prioritas penerima manfaat. Program yang hanya berjalan baik di wilayah tertentu, sementara daerah terpencil tertinggal, menunjukkan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan spirit perlindungan kelompok lemah.³⁸ Demikian pula, apabila kelompok paling miskin tidak menjadi prioritas atau distribusi bergeser pada kelompok yang lebih mudah dijangkau, maka program kehilangan orientasi maslahahnya. Keadilan juga mencakup kesetaraan kualitas, sebab ketimpangan kualitas makanan antara sekolah satu dan lainnya dapat menciptakan bentuk ketidakadilan baru dalam akses gizi.³⁹ Dalam perspektif hadis, ketidakadilan dalam distribusi harta publik adalah bentuk kezaliman, terlebih jika menyangkut kebutuhan primer. MBG yang tidak merata, diskriminatif, atau hanya dijadikan simbol politik akan bertentangan dengan tujuan syariat dan merusak esensi ri'āyah, sebab pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjangkau kelompok paling lemah, bukan hanya kelompok yang paling mudah dilayani.

³⁷ Nor Musfirah Mohamad and Azhan Taqiyaddin Arizan, "[Application Of The Fiqh Method 'No Harm To Oneself And Not Harmful To Others' (La Darar Wa La Dirar) In Dealing With The Pandemic Issue Of Covid-19 In Malaysia]," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 5, no. 1 (June 22, 2021): 153–66, <https://doi.org/10.37231/mjis.2021.5.1.157>.

³⁸ Umbreen Akhtar, Sara Gurchani, and Nadeem Tariq, "Islamic Approach of Good Governance in the Contemporary Age: A Comparative Study of Pakistan and Malaysia's Political Systems," *Global Social Sciences Review* X, no. III (September 23, 2025): 203–20, [https://doi.org/10.31703/gssr.2025\(X-III\).18](https://doi.org/10.31703/gssr.2025(X-III).18).

³⁹ Travis A. Smith, Biing-Hwan Lin, and Joanne Guthrie, "School Meal Nutrition Standards Reduce Disparities Across Income and Race/Ethnicity," *American Journal of Preventive Medicine* 67, no. 2 (August 2024): 249–57, <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2024.03.012>.

4. Dimensi *Hisbah*: Pengawasan sebagai Tuntutan Etika Hadis

Konsep pengawasan dalam Islam memiliki akar normatif yang kuat dalam prinsip amar *ma'ruf* nahi munkar serta larangan penipuan dalam muamalah.⁴⁰ Dalam sejarah Islam, mekanisme pengawasan sosial terhadap pasar, distribusi, dan kebutuhan publik dikenal dengan konsep *hisbah*, yang secara substansial berfungsi mencegah terjadinya kerusakan sebelum ia meluas menjadi mafsadah.⁴¹ Dalam konteks MBG, pengawasan tidak dapat diposisikan sekadar sebagai mekanisme administratif tambahan, melainkan sebagai syarat etis dan *syar'i* agar program yang bertujuan *maslahah* tidak berubah menjadi sumber kerusakan sosial. Program berskala nasional selalu memiliki risiko penyimpangan karena rantai distribusi yang panjang, banyaknya aktor yang terlibat, serta besarnya peluang penyalahgunaan dalam proses pengadaan. Tanpa pengawasan yang kuat, MBG rentan mengalami distorsi tujuan (*goal displacement*), yakni program yang semula dirancang untuk pemenuhan gizi anak justru berubah menjadi arena kompetisi kepentingan, baik ekonomi maupun politik. Pada titik ini, *hisbah* berfungsi sebagai “penjaga *maqṣad*”, yakni menjaga agar program tetap berada dalam koridor tujuan syariat. Oleh sebab itu, *hisbah* dalam konteks modern harus diterjemahkan menjadi audit terbuka, transparansi data penerima, kontrol kualitas makanan, pelaporan publik, serta evaluasi berkala yang melibatkan unsur masyarakat dan lembaga independen. Tanpa sistem kontrol yang ketat, MBG berisiko menjadi kebijakan yang ideal di atas kertas, tetapi rapuh dalam implementasi, sehingga *maslahah* yang dijanjikan tidak tercapai bahkan dapat bergeser menjadi mafsadah yang sistemik.

5. Etika Profesional dalam Hadis: Kompetensi dan Kelayakan Pelaksana

Kritik hadis terhadap kebijakan publik tidak berhenti pada dimensi moralitas (amanah), tetapi juga menuntut kompetensi dan kelayakan pelaksana.⁴² Dalam prinsip syariat, amanah tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, sebab ketidakmampuan dalam pengelolaan urusan publik dapat menghasilkan kerusakan yang sama berbahayanya dengan penyimpangan moral. MBG adalah program yang kompleks karena melibatkan standar gizi, rantai pasok, keamanan pangan, manajemen produksi, serta distribusi yang sensitif terhadap waktu dan kualitas. Program yang dikelola oleh pihak yang tidak kompeten akan menghasilkan risiko serius, seperti menu yang tidak memenuhi kebutuhan gizi, sanitasi yang buruk, keterlambatan distribusi, atau penurunan kualitas makanan sebelum sampai ke penerima manfaat. Dalam perspektif *maqāṣid*, kegagalan teknis semacam ini tidak dapat dianggap ringan karena langsung mengancam *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) yang menjadi tujuan utama program. Lebih jauh,

⁴⁰ Bambang Sugiharto and Muhammad Syaifullah, “Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen,” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 1 (June 30, 2023): 124–32, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1878>.

⁴¹ Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh, “Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam,” *Lab* 7, no. 01 (June 26, 2023): 55–64, <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.

⁴² Rayhan Nadindra Alfatih and Tajul Arifin, “Pemilu Dalam Perspektif Hadis Riwayat Al-Bukhari Mengenai Larangan Memilih Pemimpin Yang Tidak Kompeten,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (June 24, 2025): 537–52, <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5803>.

ketidakprofesionalan dalam kebijakan publik berpotensi menimbulkan kerusakan kepercayaan sosial, sebab masyarakat akan memandang program sebagai proyek simbolik yang tidak efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG harus berbasis kompetensi, melibatkan ahli gizi, tenaga kesehatan, sistem dapur yang terstandar, kontrol sanitasi yang ketat, serta manajemen distribusi yang profesional. Tanpa hal tersebut, program yang secara normatif baik dapat kehilangan legitimasi etisnya karena menghasilkan mudarat akibat ketidakcakapan pelaksana.

6. MBG dalam Kerangka Masalah: Kemaslahatan Tidak Cukup dengan Niat Baik

Syariat menegaskan bahwa tujuan baik tidak otomatis melahirkan legitimasi apabila cara pelaksanaannya menyimpang.⁴³ MBG tidak dapat dinilai “islami” hanya karena tujuannya memberi makan, sebab *masalah* dalam Islam mensyaratkan implementasi yang benar, aman, dan adil. Masalah bukan sekadar klaim moral, tetapi harus terbukti melalui hasil yang nyata dan proses yang bersih dari penyimpangan. Dalam konteks MBG, program ini hanya dapat dikategorikan sebagai *masalah* apabila memenuhi beberapa syarat pokok: pengelolaan yang amanah dan anti-korupsi, kualitas makanan yang memenuhi prinsip *halal-tayyib*, distribusi yang adil, serta jaminan bahwa program tidak menimbulkan bahaya bagi penerima manfaat. Sebaliknya, MBG dapat berubah menjadi mafsadah apabila terjadi penipuan, korupsi, penurunan kualitas makanan, diskriminasi distribusi, atau pemanfaatan program untuk kepentingan politik yang mengaburkan tujuan sosialnya. Bahkan, dalam kerangka *maqāṣid*, mafsadah pada kebutuhan primer lebih berat dibanding mafsadah pada kebutuhan sekunder, karena ia menyentuh keselamatan jiwa, masa depan generasi, dan stabilitas sosial. Perspektif hadis dalam hal ini memberikan batas yang tegas: kebijakan sosial yang benar bukan hanya yang memiliki niat baik, tetapi yang membawa kemaslahatan nyata, melindungi kelompok lemah, dan menutup semua pintu kerusakan yang mengkhianati amanah publik. Dengan demikian, evaluasi *syar’i* terhadap MBG harus selalu menempatkan implementasi sebagai inti penilaian, bukan sekadar desain program atau retorika kebijakan

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif hadis, baik pada level normatif maupun pada level tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī’ah*). Hadis-hadis tentang keutamaan memberi makan (*ith’ām al-ṭa’ām*), solidaritas sosial, serta tanggung jawab kepemimpinan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelompok rentan bukan hanya tindakan sosial, melainkan bagian dari nilai profetik yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*, MBG beririsan langsung dengan tujuan pokok syariat, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-’aql* (menjaga akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga generasi). Oleh karena itu, MBG dapat dipandang sebagai kebijakan *masalah ‘āmmah* yang relevan untuk memperkuat

⁴³ Danial Danial, Mahamatayuding Samah, and Munawar Rizki Jailani, “Quo Vadis Acehese Shari’a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (December 29, 2022): 621–54, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>.

kualitas kesehatan dan pendidikan, sekaligus membangun fondasi generasi yang lebih baik dalam jangka panjang.

Namun demikian, hadis tidak hanya memberikan pembenaran terhadap kebijakan sosial, tetapi juga menetapkan standar etik yang ketat bagi implementasinya. Hadis tentang amanah dan larangan penipuan (ghisy) menuntut pengelolaan program yang transparan dan bebas dari penyimpangan, sementara prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menegaskan bahwa program pangan wajib menjamin keamanan, *higienitas*, dan kualitas gizi. Selain itu, nilai keadilan distribusi menjadi parameter penting agar MBG tidak berubah menjadi program diskriminatif atau simbolik tanpa dampak nyata. Dengan demikian, MBG dapat dinilai sebagai kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai hadis dan *maqāṣid al-syarī'ah*, bahkan mendekati kategori kebijakan yang dianjurkan, selama dijalankan dengan amanah, adil, dan memenuhi standar *halal-ṭayyib*. Sebaliknya, jika pelaksanaannya disertai korupsi, ketidakadilan, atau menimbulkan mudarat, maka legitimasi *maqāṣidiyah* program tersebut dapat melemah dan berpotensi berubah dari *masalah* menjadi mafsadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Naufal Putra, Ray Wagiu Basrowi, William Ben Gunawan, Mutiara Putri Arasy, Felasiana Nurjihan, Tonny Sundjaya, Dessy Pratiwi, Hardinsyah Hardinsyah, Nurpudji Astuti Taslim, and Fahrul Nurkolis. "Unraveling Future Trends in Free School Lunch and Nutrition: Global Insights for Indonesia from Bibliometric Approach and Critical Review." *Nutrients* 17, no. 17 (August 27, 2025): 2777. <https://doi.org/10.3390/nu17172777>.
- Akhtar, Umbreen, Sara Gurchani, and Nadeem Tariq. "Islamic Approach of Good Governance in the Contemporary Age: A Comparative Study of Pakistan and Malaysia's Political Systems." *Global Social Sciences Review* X, no. III (September 23, 2025): 203–20. [https://doi.org/10.31703/gssr.2025\(X-III\).18](https://doi.org/10.31703/gssr.2025(X-III).18).
- Akseer, Nadia, Hana Tasic, Michael Nnachebe Onah, Jannah Wigle, Ramraj Rajakumar, Diana Sanchez-Hernandez, Jonathan Akuoku, et al. "Economic Costs of Childhood Stunting to the Private Sector in Low- and Middle-Income Countries." *EClinicalMedicine* 45 (March 2022): 101320. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101320>.
- Alwan Subaki, and Khafid Abadi Khafid. "Reinterpretasi Ḥifẓ An-Nasl Menurut At-Ṭāhir Bin 'Āsyūr Dan Relevansinya Terhadap Konsep Ketahanan Keluarga." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (June 29, 2025): 12–24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.
- Arifah, Umi, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh. "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *Lab* 7, no. 01 (June 26, 2023): 55–64. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.
- Burki, Talha. "Food Security and Nutrition in the World." *The Lancet Diabetes & Endocrinology* 10, no. 9 (September 2022): 622. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(22\)00220-0](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00220-0).
- Chikita Ramadhani, Farrelia Syafiq, Musthofa Muyassar Firdaus, and Mokh Iman Firmansyah. "Pemahaman Kualitas Gizi Dan Kehalalan Program Mbg Dalam Perspektif Mahasiswa Gizi : Tinjauan Hadis Nabi Muhammad Saw Terhadap Isu

- Kontaminasi Dan Pangan Ultra – Proses.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 15, no. 1 (January 15, 2026): 104–17. <https://doi.org/10.52657/jik.v15i1.3408>.
- Cohen Kadosh, Kathrin, Leilani Muhandi, Panam Parikh, Melissa Basso, Hamid Jan Jan Mohamed, Titis Prawitasari, Folake Samuel, Guansheng Ma, and Jan M. W. Geurts. “Nutritional Support of Neurodevelopment and Cognitive Function in Infants and Young Children—An Update and Novel Insights.” *Nutrients* 13, no. 1 (January 10, 2021): 199. <https://doi.org/10.3390/nu13010199>.
- Danial, Danial, Mahamatayuding Samah, and Munawar Rizki Jailani. “Quo Vadis Acehese Shari’a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (December 29, 2022): 621–54. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.621-654>.
- Fadilla, Derri Fadilla, and Muhammad Arya Arya. “The Relevance of Islamic Law in the Formation of Public Policy in the Era of Globalization.” *Alhamdulillah : Jurnal Agama Islam* 3, no. 02 (December 30, 2024): 41–45. <https://doi.org/10.54209/alhamdulillah.v3i02.315>.
- Faris, Salman. “Sunnah as a Bridge between Theological and Practical Dimensions.” *Dirasah International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (August 2, 2024): 120–35. <https://doi.org/10.59373/drs.v2i2.31>.
- Haris, Arkin, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri, and Siti Sarah. “Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, August 13, 2024, 219–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.
- Imana, Anis Ni’am. “Implementation Of Maqāṣid Al-Syarī’ah As Model Government’s Policy At Malang City On Period 2011-2016.” *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1 (December 31, 2018). <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol14.Iss1.104>.
- Jannatul Firdausiyah, and Ainur Rofiq Sofa. “Relevansi Al-Qur’an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Tekn.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (December 12, 2024): 102–31. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872>.
- Kaimowitz, David, and Douglas Sheil. “Conserving What and for Whom? Why Conservation Should Help Meet Basic Human Needs in the Tropics.” *Biotropica* 39, no. 5 (September 15, 2007): 567–74. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2007.00332.x>.
- Khumaimah, Rinatul, and Zulfatun Anisah. “The Essence of Giving Food as The Spirit of Islam in The Book "الاعطام روح الاسلام" by Syeh Ali Bin Ali Bin Ibrahim U’dhobi.” *Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought* 4 (July 19, 2024): 50–58. <https://doi.org/10.15642/ICMUST.4.2024.1657>.
- Li, Saiya, and Yali Zhang. “More Unequal Food Distribution in Low-Income Countries Exacerbates Global Hunger Risk.” *Sustainable Production and Consumption* 46 (May 2024): 108–18. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.02.009>.

- Mifti Ibdalia, and Muhammad Albahi. "Ekonomi Dan Politik Pendekatan Maqasid Syariah." *Economic Reviews Journal* 4, no. 1 (March 25, 2025): 355–64. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.637>.
- Mohamad, Nor Musfirah, and Azhan Taqiyaddin Arizan. "[Application Of The Fiqh Method 'No Harm To Oneself And Not Harmful To Others' (La Darar Wa La Dirar) In Dealing With The Pandemic Issue Of Covid-19 In Malaysia]." *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 5, no. 1 (June 22, 2021): 153–66. <https://doi.org/10.37231/mjis.2021.5.1.157>.
- Möller, Christian. "Discipline and Feed: Food Banks, Pastoral Power, and the Medicalisation of Poverty in the UK." *Sociological Research Online* 26, no. 4 (December 5, 2021): 853–70. <https://doi.org/10.1177/1360780420982625>.
- Muhammad Hamdi. "Implementasi Hadis-Hadis Tentang Tanggung Jawab Kepemimpinan: Studi Ma'anil Hadis." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7, no. 9 (September 2, 2025). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i9.9727>.
- Muhammadong Muhammadong. "The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 5 (October 31, 2025): 136–46. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i5.1508>.
- Muhyidin, Ahmad, and Muhammad Syarofi. "Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia Dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz Al-Nafs." *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* 6, no. 1 (January 25, 2026): 5214–20. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7506>.
- Muliyanty, Irka, Hamdanah Hamdanah, and Noor Fahmi. "Dasar Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan." *Journal on Education* 6, no. 4 (June 18, 2024): 20928–35. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6226>.
- Narayana, Raden Abyan Aradea, and Aris Machmud. "Audit Negara Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'Ah." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (July 15, 2025): 607–23. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.372>.
- Nurul Azzahra, Akbar Dwi Dharmawan, Aras Fikar Mardatilah, Mohamad Ilham Habibi, Virliana Amanda Putri Aryani, and Suhardi. "Pelaksanaan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Di SMP Negeri 4 Tangerang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (June 21, 2025): 5036–44. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1335>.
- Nurul Meydianti, Dinda, Marwin, and Hendriyadi. "Fiqh Siyasah as an Analytical Framework for Literacy Policy Implementation: Evidence from West Lampung, Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, January 15, 2026, 124–38. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11249>.
- Prado, Elizabeth L, Susy K Sebayang, Mandri Apriatni, Siti R Adawiyah, Nina Hidayati, Ayuniarti Islamiyah, Sudirman Siddiq, et al. "Maternal Multiple Micronutrient Supplementation and Other Biomedical and Socioenvironmental Influences on Children's Cognition at Age 9–12 Years in Indonesia: Follow-up of the SUMMIT Randomised Trial." *The Lancet Global Health* 5, no. 2 (February 2017): e217–28. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(16\)30354-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(16)30354-0).

- Rahmawati, Aulia, and Bagus Satrio. "Re-Actualization of the Concept of Al-Maslahah Al-Mursalah in Sharia-Based Public Policy Formulation." *Samarinda International Journal of Islamic Studies*, May 26, 2024, 89–100. <https://doi.org/10.64093/sijis.v1i2.596>.
- Rayhan Nadindra Alfatih, and Tajul Arifin. "Pemilu Dalam Perspektif Hadis Riwayat Al-Bukhari Mengenai Larangan Memilih Pemimpin Yang Tidak Kompeten." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (June 24, 2025): 537–52. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5803>.
- Reeves, Aaron, Rachel Loopstra, and Valerie Tarasuk. "Family Policy and Food Insecurity: An Observational Analysis in 142 Countries." *The Lancet Planetary Health* 5, no. 8 (August 2021): e506–13. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00151-0](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00151-0).
- Roberts, Marina, Terezie Tolar-Peterson, Abby Reynolds, Caitlin Wall, Nicole Reeder, and Gina Rico Mendez. "The Effects of Nutritional Interventions on the Cognitive Development of Preschool-Age Children: A Systematic Review." *Nutrients* 14, no. 3 (January 26, 2022): 532. <https://doi.org/10.3390/nu14030532>.
- Saefudin, Asep, Abd. Muid N, and Kerwanto Kerwanto. "Money Politic, Gratifikasi, Dan Hadiah Perspektif Al-Isfahani Dalam Kitab Al-Mufradât Fî Gharîb Al-Qur'ân." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 11 (August 14, 2025). <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i11.262>.
- Smith, Travis A., Biing-Hwan Lin, and Joanne Guthrie. "School Meal Nutrition Standards Reduce Disparities Across Income and Race/Ethnicity." *American Journal of Preventive Medicine* 67, no. 2 (August 2024): 249–57. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2024.03.012>.
- Sotiraki, Marianthi, Aggeliki Malliou, Ntaniela Tachirai, Nikoletta Kellari, Maria G. Grammatikopoulou, Theodoros N. Sargentanis, and Tonia Vassilakou. "Burden of Childhood Malnutrition: A Roadmap of Global and European Policies Promoting Healthy Nutrition for Infants and Young Children." *Children* 9, no. 8 (August 6, 2022): 1179. <https://doi.org/10.3390/children9081179>.
- Sugiharto, Bambang, and Muhammad Syaifullah. "Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 1 (June 30, 2023): 124–32. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1878>.
- Suprpto, Firre An, Editha Praditya, Refi Marizka Dewi, and Wignyo Adiyoso. "A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program." *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 6, no. 2 (August 24, 2025): 297–312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>.
- Syahrul, Muhammad, Patta Bundu, and Farida Aryani. "Exploring the Need for a Prophetic-Based Group Counseling Model to Enhance Student Discipline in Madrasah Aliyah." *International Journal of Current Science Research and Review* 08, no. 08 (August 26, 2025). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i8-40>.
- Tangkudung, Audrey G. "Prabowo-Gibran's Free Nutritious Food: Impacts on Human Capital and Community Economy." *Journal of Comprehensive Science* 4, no. 5 (June 1, 2025): 1578–87. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i5.3146>.

Thirunavukkarasu, Ashokkumar, Bader Alanazi, Abdulrahman Alfaleh, Hani Hathath Alsulami, Sulaiman Abdullah Albudayr, Abdulrahman Saad Alotaibi, Reema Mohammed Alenezi, Araa Ghanem Alruwaili, and Noor Oqalaa Alibrahim. "Evaluation of Dietary Patterns and Their Impact on Eye Health among Saudi Adults—A Multi-Regional Cross-Sectional Analysis in Makkah, Riyadh, and Qassim." *Frontiers in Nutrition* 11 (June 18, 2024). <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1383725>.